TRIBUN PONTIANAK

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des

2018 Hal.: 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Transparansi Keuangan

ANGGOTA DPRD Kalbar Kadri mengatakan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam pemerintahan merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan uang negara.

"Kita apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir. Begitu juga pemerintah kabupaten dan kota lainnya. Ini bukti menciptakan tata kelola keuangan daerah bersih," ungkapnya.

DPRD Kalbar selaku legislatif, kata dia, tentu mempunyai fungsi pengawasan. Tentunya, setiap ada temuan-temuan dari BPK, DPRD siap mengawasi terhadap langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar.

"Kami akan memonitoring ketika ada temuan BPK, serta tindak lanjut terhadap apa-apa yang harus dilakukan," terangnya.

Hal ini agar temuan-temuan BPK dapat segera diselesaikan. Terutama, beberapa aspek temuan yang telah berulang-ulang dan belum selesai hingga kini.

"Jadi, temuan BPK harus diselesaikan. DPRD Kalbar tentu akan membangun sinergitas dengan BPK dalam upaya menyelesaikan catatan temuan BPK oleh Pemprov," tukasnya. **(pra)**